

**KEABSAHAN JUAL BELI KAYU JATI SECARA
ONLINE DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA
BAGI PEMBELI DAN PENJUAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

VERYNA KUSUMA WARDANI
NPM. 5117500026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

**KEABSAHAN JUAL BELI KAYU JATI SECARA ONLINE
DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMBELI DAN
PENJUAL**

Disusun Oleh :

**VERYNA KUSUMA WARDANI
NPM. 5117500064**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :**

Pembimbing I



**IMAM ASMARUDIN, S.H., M.H
NIDN. 0625058106**

Pembimbing II



**TIYAS VIKA WIDYASTUTI, S.H., M.H.
NIDN. 0619058703**

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**KEABSAHAN JUAL BELI KAYU JATI SECARA ONLINE DAN
PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMBELI DAN PENJUAL**

Oleh :

**VERYN KUSUMA WARDANI
NPM 5117500064**

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :

Hari : Sabtu

Tanggal : 6 Maret 2021

Penguji I



Dr. H. SANUSI, S.H., M.H
NIDN. 0609086202

Penguji II



FAJAR DIAN ARYANI, S.H., M.H
NIDN. 0608087702

Pembimbing I



IMAM ASMARUDIN, S.H., M.H
NIDN. 0625058106

Pembimbing II



TIYAS VIKI WIDYASTUTI, S.H., M.H
NIDN. 0619058703

Mengetahui
Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Veryna Kusuma Wardani
NPM : 5117500026
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 10 November 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Keabsahan Jual Beli Kayu Jati Secara Online dan
Perlindungan Hukumnya bagi Pembeli dan
Penjual

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar sarjana Hukum (S.H.) yang penulis peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, Juli 2021

Yang Menyatakan



Veryna Kusuma Wardani

NPM. 5117500026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) keabsahan jual beli kayu jati secara online, (2) perlindungan hukum pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli kayu jati secara online.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) data-data atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum sekunder, pendekatan bersifat normatif (*legal research*). Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas dalam ketentuan perundangan.

Hasil penelitian (1) Istilah jual beli pada dasarnya merupakan '*contract of sale*', merujuk Pasal 1457 KUHPerdara, "jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak 1 mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain (pihak 2) untuk membayar harga yang dijanjikan. Esensinya penyerahan benda dan membayar harga. Keabsahan transaksi pembelian kayu jati di Website Toko Online Perhutani pada dasarnya memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 BW. Dasar keabsahan terjadi apabila pihak penjual dan pembeli sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Keabsahan terjadi pada saat proses pembayaran secara langsung ataupun dibayarkan secara bertahap dari harga yang disepakati. (2) Perlindungan hukum pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli kayu jati secara online, terpenuhinya kewajiban ini berarti telah terjadi pelanggaran hak bagi pihak lain (pembeli) dan akibat hukumnya adalah menimbulkan kerugian. Perlindungan hukum didasarkan pada Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

This study aims to find out (1) the validity of buying and selling teak wood online, (2) legal protection of buyers and sellers in the transaction of buying and selling teak wood online.

This type of research is a library research data or materials needed to complete the research comes from literature either in the form of journals, literature, books, research reports, and so forth Data collection obtained from secondary legal materials, normative approach (legal research). Normative juridical approach is an approach that is done to seek the truth by looking at the principles in the provisions of the legislation.

The result of the study (1) The term of sale is basically a 'contract of sale, referencing Article 1457 of the Civil Code, "a trade is an agreement by which party 1 binds itself to submit a material and the other party (party 2) to pay the promised price. The essence is the surrender of objects and paying the price. The validity of teak wood purchase transactions on the Perhutani Online Store Website basically has the same validity as conventional agreements as long as it is proven and meets the provisions in Article 1320 BW. The basis of validity occurs when the seller and the buyer both agree and there is an agreement between the buyer and the seller in communicating about the offer of goods and the selection of the desired goods and both have agreed that there is an agreement. Validity occurs during the payment process directly or paid in stages from the agreed price. (2) Legal protection of buyers and sellers in the transaction of buying and selling teak wood online, the fulfillment of this obligation means that there has been a violation of rights for the other party (buyer) and the legal consequences are to cause losses. Legal protection is based on Article 38 and Article 39 of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions as amended by Law No. 19 of 2016 on ITE and Article 23 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

MOTTO

Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran
(Ali bin Abi Tholib RA)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, Rahmat, Hidayah, Rezeki, dan memberikan kelancaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Mamah, papah, dan kakakku Devi Ratna Puspitasari

Terima kasih doa dukungan dan motivasinya agar bias menyelesaikan kuliah ini

Suamiku tercinta Saharza Ananda Sylviano

You are the best partner atas do'a motivasi semangat cinta kasih sayang dan pengorbanan yang diberikan

Anakku Syahna Aleena Sylviano,

Terima kasih atas suka citanya.

Teman-teman genggong (Adelia Kiki Ulina Syam)

Terima kasih sudah menemani selama perkuliahan dengan penuh suka duka

Terima kasih kepada dosen-dosen saya atas bimbingannya..

KATA PENGANTAR

Dipanjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul : ‘Keabsahan Jual Beli Kayu Jati Secara Online dan Perlindungan Hukumnya bagi Pembeli dan Penjual’, sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Berkenaan dengan penyusunan skripsi inilah, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang sebesar-besar kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fakhruddin, M.Pd., Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H, Wakil Dekan I Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Bapak Tony Haryadi, Wakil Dekan II Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Imam Asmarudin, S.H., M.H. Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Bapak Muhammad Wildan, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

7. Bapak Imam Asmarudin, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran serta petunjuk yang berharga bagi penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran serta petunjuk yang berharga bagi penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf yang telah membimbing dan membantu melancarkan penulis dalam menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
10. Semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu sehingga terselesaikannya Skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga masih jauh dari sempurna. Oleh karena itulah kritik konstruktif senantiasa penulis diharapkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik di lingkungan akademik maupun lingkungan masyarakat pada umumnya.

Tegal, Juli 2021

Penulis.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAKSI.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	17

A. Tinjauan Umum Jual Beli.....	17
B. Tinjauan Umum Konsumen, Pelaku Usaha, Barang, dan Perlindungan Konsumen.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Keabsahan Jual Beli Kayu Jati Secara Online.....	45
B. Perlindungan Hukum Pembeli dan Penjual dalam Transaksi Jual Beli Kayu Jati secara Online.....	59
BAB IV PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perdata adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya dan bermasyarakat. Hukum perdata ini dikatakan sebagai hukum yang bersifat privat, karena yang diatur adalah mengenai hubungan dan kepentingan antara yang satu dengan yang lain.¹

Salah satu hubungan dan kepentingan yang terjadi masyarakat saat ini adalah transaksi jual beli secara *online*, sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ketika seseorang sedang terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila komputer *online* (*connect* dengan internet) maka dapat mengakses internet atau *browsing*, mencari informasi-informasi di internet dan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang sangat pesat, terbukti dengan kemajuan hampir pada seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan adalah pemanfaatan internet. Selain sebagai sumber belajar Internet juga hadir sebagai media yang multifungsi. Komunikasi melalui internet dapat dilakukan secara interpersonal (misalnya *e-mail* dan *chatting*) atau secara massal, yang dikenal *one to many communication* (misalnya *mailing list*). Internet juga mampu hadir secara *real time*

¹ Yosvita Prasetyaningtyas. *Hukum untuk orang awam*. Efata Publising. Yogyakarta. 2014. Hlm.21

dalam bentuk audio visual seperti pada metoda konvensional dengan adanya aplikasi *teleconference*.²

Dengan menggunakan internet, kegiatan bertukar informasi dapat dilakukan secara elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah *electronic-commerce* dan disingkat *e-commerce*. *E-commerce* adalah konsep yang menjelaskan proses pembelian dan penjualan dari suatu produk barang, jasa, informasi melalui jaringan komputer yang melingkupi internet.³ Dalam hal ini, *e-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi para konsumen, namun juga memudahkan para produsen dalam memasarkan produknya.

Pelaksanaan transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula, baik melalui e-mail atau cara lainnya. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud.

Keberadaan toko online saat ini semakin banyak, apalagi dengan dukungan media jejaring sosial, seperti *facebook*, *twitter*, *blog*, *multiply*, dan sebagainya yang sangat berguna untuk mempromosikan produk yang ingin di jual/di beli. Media sosial inilah merupakan salah satu media yang membuat berbelanja online semakin

² <http://edel.staff.unja.ac.id/blog/artikel/Internet-Sebagai-Sumber-Belajar.html> diakses 30 April 2021

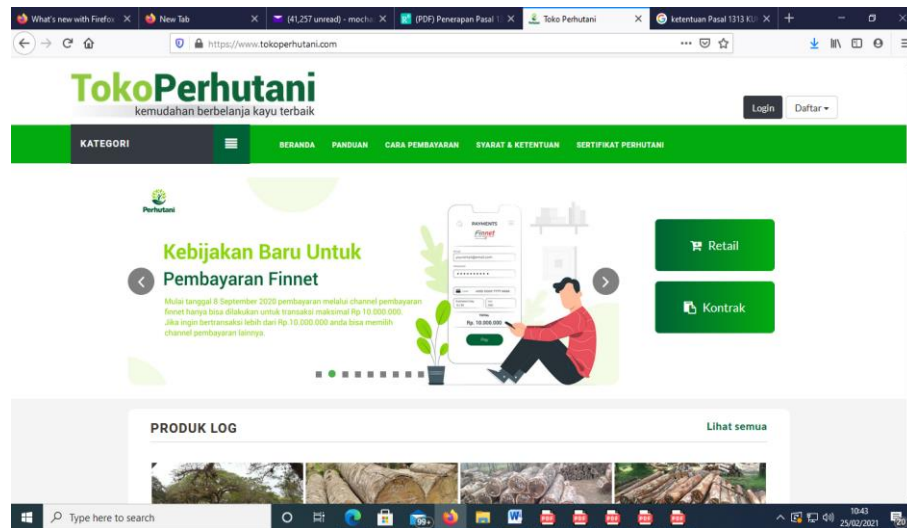
³ Ridwan Khairandy, "Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce", Jurnal Hukum Vol 18 No.16, 2001, halaman 43

mudah terjadi. Pada awal kemunculannya di Indonesia, berbelanja online hanya di gunakan oleh masyarakat dari kalangan atas, karena berbelanja online membutuhkan komputer, jaringan internet, dan kartu debit untuk melakukan transaksi jual/beli tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, dikarenakan oleh faktor kenyamanan dan kecepatan, sekarang mulai dari ibu-ibu pejabat, sampai mahasiswa/mahasiswi banyak yg memanfaatkan berbelanja dengan online. Kelebihan *Online Shop* di anggap menjanjikan bagi beberapa pihak. Keuntungan yang di hasilkan juga tak patut di pertanyakan lagi. Tak perlu bermodal toko secara fisik untuk mempromosikan barang yang di jual, siapa saja dapat mempromosikan.

Lewat gambar yang selanjutnya di pajang di website atau toko virtual melalui internet, tidak hanya memiliki kelebihan dalam segi kemudahan saja, dimana kita tinggal meng klik saja, menurut ada alasan orang lebih memilih melakukan belanja online atau *online shop* setidaknya dapat menghemat tenaga, dan tidak perlu mengantre di kasir pembayaran.

Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi antara pihak-pihak *customer to business*, merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara individu sebagai penjual dengan sebuah perusahaan sebagai pembelinya. Atau sebaliknya antara individu sebagai pembeli dengan sebuah perusahaan sebagai penjualnya. Keterkaitannya dengan *customer to business* penjualan kayu jati tersebut, berikut dicontohkan salah satu *website* penjual kayu jati sebagai berikut:

Gambar 1
Website Toko Perhutani



Penjualan *online* produk Perhutani merupakan salah satu perwujudan MoU sinergi BUMN. Telkom Indonesia telah mendukung pembangunan dan pengembangan aplikasi maupun infrastruktur dalam bisnis Perum Perhutani dengan berbagai solusi, di antaranya Pengembangan *Enterprise Resource Planning*, *Business Intelligence*, *e-Office*, Komunikasi data antar KPH, Infrastruktur data semua TPK dan yang terakhir POTP dalam bisnis Perum Perhutani dengan pemanfaatan ICT,” Dalam konteks layanan, Telkom berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan TIMES (Telekomunikasi, Informasi, Media, *Edutainment*, dan *Services*) untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perum Perhutani, serta berperan lebih besar untuk pengembangan.⁴

Perdagangan elektronik menjanjikan efisiensi, baik dari segi waktu dan biaya serta kenyamanan konsumen dalam bertransaksi, pesatnya perkembangan *e-commerce* ini sangat dimungkinkan. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya

⁴ <https://perhutani.co.id/perhutani-luncurkan-toko-online-jual-kayu/> diakses Kamis 25/2021

pengguna internet oleh negara-negara maju di dunia.

Kegiatan berbisnis melalui internet (*e-commerce*) banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli ini dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semua transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet, dilakukan tanpa adanya tatap muka antara pihak penjual dan pihak pembeli, mereka melakukan transaksi jual beli atas dasar kepercayaan satu sama lain. Sehingga perjanjian jual beli antara para pihak pun dilakukan secara elektronik.⁵ Namun, di samping beberapa kemudahan yang disebutkan di atas, transaksi jual beli melalui *e-commerce* juga memberikan beberapa permasalahan yang sering terjadi yaitu barang tidak sampai kepada pembeli, tidak sesuai dengan barang yang diiklankan dengan kenyataannya, atau kegagalan pada saat bertransaksi. Sehingga, ada banyak hal yang membuat calon pembeli merasa ragu atas kebenaran data dan informasi yang diiklankan.

Transaksi perdagangan elektronik dalam konsep pasar tradisional yang mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, berubah menjadi konsep *telemarketing* yaitu perdagangan jarak jauh melalui internet. Sehingga, *E-commerce* pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkannya. Hubungan dagang tersebut seharusnya dilandasi dengan suatu perjanjian. Sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara tertulis untuk menghindari resiko yang akan datang dikemudian hari.⁶

⁵Darmawan Tri Budi Utomo, "*Penyelesaian Sengketa Transaksi Jual Beli Melalui Internet (e-commerce)*", Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.7 No.2, 2010, hlm. 135.

⁶Afrilian Perdana, Dahlan dan Mahfud, "*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*", Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No.1, 2014, hlm. 52.

Permasalahan hukum yang sangat dimungkinkan, yakni terjadinya penipuan oleh pelaku usaha dalam kegiatan jual beli yang dilakukan secara online. Transaksi *online* merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Transaksi *online* semakin banyak mendapatkan perhatian dari para peminat jual beli *online* seiring perkembangan teknologi yang memudahkan proses jual beli tersebut. Selain disebabkan oleh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan mudah serta praktis karena masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk. Tingginya tingkat pengaduan oleh konsumen di Indonesia terkait dengan penipuan dalam jual beli *online* tentunya perlu mendapatkan perhatian. Hal tersebut berarti konsumen dalam melakukan transaksi *online* memerlukan perlindungan secara hukum apabila terjadi permasalahan sebagaimana yang mungkin terjadi.⁷

Perjanjian didalam *e-commerce* dengan perjanjian biasa tidaklah berbeda jauh, yang membedakan hanya pada bentuk dan masa berlakunya. Media yang biasa digunakan dalam perjanjian biasa adalah tinta dan kertas yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat. Setelah dibuat, disepakati dan ditandatangani maka perjanjian tersebut telah mengikat para pihak. Sedangkan dalam *e-commerce* perjanjian dibuat menggunakan media elektronik yang berisi *form* atau blanko yang dibuat oleh pihak penjual dan ditampilkan dalam halaman web. Untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut, calon pembeli cukup menekan tombol yang disediakan. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai sah atau tidaknya perjanjian dalam jual beli elektronik.

⁷ Ester Dwi Magfirah, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 2009. hlm. 41.

Di dalam suatu perjanjian harus terpenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, hal ini telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPdata. Suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pembuatnya, apabila sudah terpenuhinya empat syarat sah perjanjian tersebut. Pada suatu perjanjian, sering terjadi permasalahan wanprestasi didalam perjanjian antara para pihak. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan kewajiban yang telah menjadi objek perjanjian di antara para pihak.

Berdasarkan pasal 1233 KUHPdata, tindakan wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang ikut dalam perjanjiannya, maka pihak yang dirugikan berhak meminta perlindungan hukum melalui pengadilan untuk memaksa orang yang melakukan wanprestasi kembali menjalankan kewajibanya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Selain itu, orang yang melakukan wanprestasi juga dapat dihukum untuk mengganti kerugian dalam bentuk yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Mengingat pentingnya perlindungan hukum, Indonesia mengeluarkan Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, kenyataanya Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya mengatur tentang transaksi elektronik, hanya beberapa saja yang dapat dipergunakan dalam transaksi elektronik. Kemudian, pada tahun 2008 pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengeluarkan peraturan khusus untuk mengatur transaksi melalui media elektronik yaitu Undang–Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa disingkat UU ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

Didalam ketentuan pasal 1 dan pasal 2 UU ITE disebutkan mengenai definisi transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Pada transaksi elektronik, pihak-pihak yang ada didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu perjanjian yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 17 UU ITE yang menyebutkan bahwa perjanjian elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) bertujuan untuk mendorong perkembangan *e-commerce* yang berkelanjutan di Indonesia. Sejumlah pengaturan dalam PP PMSE salah satunya aspek perlindungan bagi konsumen. Pengaturan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.

Seorang konsumen pada saat mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk barang, maka setiap konsumen pasti menginginkan adanya kepuasan terhadap produk yang dipakainya, sehingga konsumen menginginkan adanya informasi yang jelas atas produk yang akan dibeli. Hal itu untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang dibeli tidak berbahaya dan aman bagi kesehatannya, produk yang dibeli sesuai dengan keinginannya, konsumen tahu cara penggunaannya, dan ada garansi dari produk yang dibelinya.⁸

⁸ Dianne Eka Rusmawati, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 2, 2013, halaman 195.

Pada kenyataannya, seringkali konsumen tidak mendapatkan apa yang diharapkan, sehingga mereka selalu merasa dirugikan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian jual beli online (*e-commerce*) dan bagaimana akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli online serta solusinya.

Istilah jual beli pada dasarnya merupakan '*contract of sale*, adapun perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak 1 mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain (pihak 2) untuk membayar harga yang dijanjikan. Esensinya penyerahan benda dan membayar harga.⁹sampai dengan Oleh karena uraian dan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis akan mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai transaksi jual beli online (*e-commerce*) sebagai dasar penyusunan penulisan hukum dengan judul: "Keabsahan Jual Beli Kayu Jati Secara Online dan Perlindungan Hukumnya bagi Pembeli dan Penjual"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan untuk dijadikan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan jual beli kayu jati secara online?
2. Bagaimana perlindungan hukum pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli kayu jati secara online?

⁹ Salim HS. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-empatbelas, 2019. Hlm.48

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan jual beli kayu jati secara online
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli kayu jati secara online.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu keperdataan khususnya mengenai keabsahan jual beli kayu jati secara online dan perlindungan hukumnya bagi pembeli dan penjual

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman masyarakat dalam memahami keabsahan jual beli kayu jati secara online dan perlindungan hukumnya bagi pembeli dan penjual

E. Tinjauan Pustaka

Berikut ini ada 3 penelitian yang terdahulu dan relevan dengan, keabsahan jual beli kayu jati secara online dan perlindungan hukumnya bagi pembeli dan penjual antara lain:

1. Zuni Rusviana, Adi Suliantoro¹⁰ meneliti tentang Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*ECommerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dinamika Hukum. Hasil penelitiannya yakni keabsahan perjanjian jual beli melalui internet harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 BW. Dasar keabsahan terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Keabsahan sendiri terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian dimana pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayarkan secara bertahap dari harga yang disepakati. Perjanjian jual beli melalui internet juga harus memenuhi syarat-syarat sah-nya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 BW yang dapat dibuktikan dan juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang/ketertiban umum. Akibat hukum wanprestasi yaitu menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli *online* apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi, karena wanprestasi tersebut telah merugikan pihak lain. Ganti rugi atas wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian serta ganti rugi, ganti rugi biasa, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Menurut pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi itu karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. Solusi jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online* tahap yang dapat diambil

¹⁰Zuni Rusviana, Adi Suliantoro Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*ECommerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dinamika Hukum Vol 21 no 2 Agustus 2018

antara lain : melalui Litigasi menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang ITE dan melalui non Litigasi menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE. Cegah dan laporkan melalui situs *online* serta laporkan langsung ke polisi dan laporkan ke bank.

2. Ekawati¹¹ meneliti tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Online Pada Toko Online *Myrubylicious* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian : jual beli secara online pada toko *online myrubylicious* telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya jual beli sehingga dalam hal ini, jual beli secara online pada toko *online myrubylicious* dianggap tetap dapat berlangsung secara sah menurut hukum. Selain itu, jika konsumen menerima barang yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan kepadanya, maka selaku pemilik toko *online myrubylicious* bersedia memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang yang sudah dibayarkan atau konsumen berhak memilih barang lain sesuai dengan harga barang yang dipesan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 Ayat (1) PP No. 82 Tahun 2012. Namun, dalam penerapan UU ITE masih terdapat banyak kendala, sehingga UU ITE belum bisa secara maksimal memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan khususnya dalam hal transaksi jual beli secara online.
3. Ahmad Ansyari Siregar, Budiman Ginting, T. Keizerina Devi Azwar, Jelly Leviza¹², meneliti tentang Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari

¹¹ Ekawati meneliti tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Online Pada Toko Online *Myrubylicious* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Al Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

¹² Ahmad Ansyari Siregar dkk Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Perkembangan teknologi membuat manusia menikmati segala kemudahan dalam mendapatkan informasi yang begitu mudah, bahkan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam jual beli tanpa bertemu langsung dengan penjual bahkan sampai antar negara. Hal ini dapat dilakukan dengan transaksi jual beli online melalui media elektronik yaitu hanya menggunakan telfon genggam atau sekarang disebut dengan Android. Jual beli online berkembang sesuai dengan zamannya dahulu dilakukan dengan melalui *Blackberry Messenger* dan sekarang berkembang dengan aplikasi jual beli online yang ada terdapat di Android, dengan menggunakan jaringan internet sesuai dengan provider sellular masing-masing pengguna. Dalam melaksanakan jual beli online diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2016 perubahan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta diatur juga dalam pasal 1320 KUHPdata. Dalam pelaksanaan jual beli Online tidak dapat dihindari pula dari perbuatan nakal Penjual bahkan Pembeli, dalam perbuatan wanprestasi.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan suatu karya ilmiah diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* dengan fokus hanya pada data skunder. Sumber data yang diperoleh hasil bedah dokumen.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar mengenai keabsahan jual beli kayu jati secara *online* dan perlindungan hukumnya bagi pembeli dan penjual.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, pada dasarnya dapat dibedakan antara data sekunder yang bersifat pribadi dengan data sekunder yang bersifat publik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi:

- 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Hukum Acara Perdata Indonesia
- 4) Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 Tentang ITE
sebagaimana telah dirubah dengan Ungsmh Undang Nomor 19 tahun
2016 tentang ITE

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum sekunder meliputi: jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni keabsahan jual beli kayu jati secara online dan perlindungan hukumnya bagi pembeli dan penjual.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh data yang akan diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Teknik pengumpulan data antara lain studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan, yaitu hal-hal yang bersifat khusus.

5. Metode Analisis Data

Hal yang penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah teknik analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.¹³ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Kualitatif artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa kata-kata (bukan angka), gambar, rekaman identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini direncanakan terdiri dari empat bab sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, yang meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Konsepsional, berisi tentang tinjauan umum jual beli, tinjauan umum kayu jati, tinjauan umum penjualan dan pemberian barang secara online, pengertian konsumen, pelaku usaha, barang, dan jasa dalam hukum perlindungan konsumen dan perlindungan hukum bagi pembeli dan penjual.
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini merupakan jawaban atas masalah yang dirumuskan yang pada dasarnya mengenai keabsahan jual beli kayu jati secara online dan perlindungan hukumnya bagi pembeli dan penjual.
- Bab IV : Penutup, terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dan saran yang perlu dikemukakan berdasarkan penelitian

¹³ *Ibid*, hlm.280

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara perdata, disebutkan dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”. Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berartisuatu perjanjian bertimbal balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹⁴ Jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga,¹⁵

Jual beli ini dikenal dalam istilah Belanda “*koop en verkoop*” yang memiliki pengertian bahwa pihak yang satu “*verkoop*” (menjual) sedang yang lainnya “*koop*” (membeli). Jika dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya “*sale*” saja yang berarti penjualan (hanya dilihat dari sudut pandang si penjual saja), demikian juga dalam bahasa Perancis disebut

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985. hlm.17

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 1986:243

dengan istilah “*vente*” yang berarti penjualan. Sedangkan dalam bahasa Jerman digunakan kata “*kauf*” yang berarti pembelian. Barang yang menjadi objek dalam jual beli harus jelas setidaknya-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli.

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat muncul kata sepakat mengenai barang dan harga. Ketika para pihak setuju terhadap barang dan harga, maka perjanjian jual beli sudah sah.

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Mengenai perpindahan hak milik diatur dalam pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut pasal 612, 613 dan 616.

Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Selain asas *konsensualisme*, hukum perjanjian jual beli juga menganut asas *obligatoir*, yaitu bahwa perjanjian jual beli baru menetapkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara pihak penjual dengan pembeli.

2. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Dalam hal jual beli tentunya ada prestasi yang diharapkan dari masing-masing pihak yang sering disebut dengan hak dan kewajiban. Selanjutnya akan diuraikan tentang hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli.

a. Hak dan Kewajiban Penjual

Bagi pihak si penjual ada dua kewajiban utama yang diatur dalam pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”. Jadi yang harus dilakukan oleh penjual adalah :

1) Menyerahkan hak milik

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal tiga macam jenis barang yaitu barang bergerak, barang tetap, barang tak bertubuh. Oleh sebab itu maka ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing barang tersebut. Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, sesuai dengan bunyi pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada”.

Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang

hendak menerimanya.”

Dari ketentuan pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat adanya kemungkinan menyerahkan kunci saja kalau dijual adalah barang-barang yang berada dalam suatu gudang, dimana merupakan suatu penyerahan kekuasaan secara simbolis, sedangkan apabila barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli penyerahan cukup dilakukan dengan suatu pernyataan saja, yang dikenal dengan nama *traditio brevi manu* (bahasa latin) yang berarti penyerahan tangan pendek.

Untuk barang tetap (tak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan *overschrijving* (balik nama) di muka pegawai kadaster atau pegawai balik nama atau pegawai penyimpan hipotik, sesuai dengan Pasal 616 dan Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 616 ”Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam pasal 620”.

Pasal 620 :”Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta tersebut atau surat keputusan hakim ke kantor penyimpan hipotek di lingkungan tempat barang tak bergerak yang harus itu berada, dan dengan mendaftarkan salinan ini dalam daftar yang telah ditentukan”. Bersama dengan itu, orang yang bersangkutan harus menyampaikan jugasalinan otentik yang kedua atau petikan dari akta atau keputusan

hakim, agar penyimpan hipotek mencatat di dalamnya hari pemindahan beserta bagian dan nomor daftar yang bersangkutan”.

Di Indonesia penyerahan benda tak bergerak tidak menurut pasal 616-620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan *overschrijvingsordonnantie* S. 1834 Nomor 27 menyatakan bahwa penyerahan benda-benda tidak bergerak harus dilakukan di tempat R.v.J. di hadapan hakim Raad van Justitie. Kemudian pada tahun 1947 No. 53 menyatakan bahwa pendaftaran tidak lagi dilakukan di hadapan hakim R.v.J. melainkan di hadapan kepala seksi pendaftaran tanah (Kadaster). Kemudian, dikeluarkan Undang-Undang No.24 tahun 1954 (L. 1954 No.78) yang menyatakan bahwa penyerahan terhadap benda-benda tak bergerak harus mendapat izin dari Menteri Kehakiman, jika tidak maka perbuatan itu akan batal karena hukum. Dalam pelaksanaannya kekuasaan memberi izin itu dikuasakan oleh Menteri Kehakiman kepada Jaksa Pengadilan Negeri.¹⁶

Untuk barang tak bertubuh dengan perbuatan yang dinamakan *cessie* sebagaimana diatur dalam pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “ Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain ”.

Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum

¹⁶ www.hukumonline.com: 16 September 2009

penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu” (Pasal 613 ayat (1)).

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut sistem bahwa perjanjian jual beli itu hanya *obligatoir* saja, artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak yaitu kewajiban penjual untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya serta memberikan hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui, selain itu meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Dengan kata lain jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah ketika dilakukan *levering* atau penyerahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *levering* merupakan suatu perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik (*transfer of ownership*).¹⁷

- 2) Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tentram merupakan konsekuensi dari jaminan yang oleh penjual diberikan kepada

¹⁷ www.hukumonline.com

pembeli bahwa barang yang dijual dan diserahkan itu benar-benar milik si penjual yang bebas dari tuntutan pihak lainnya.

Penjual mempunyai kewajiban memberikan penggantian kerugian jika sampai terjadi si pembeli mendapat gugatan dari pihak ketiga dan dengan putusan Hakim dihukum untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya kepada pihak ketiga, dalam bahasa Inggris disebut *eviction*. Atau si pembeli sewaktu digugat di muka pengadilan oleh pihak ketiga, pembeli meminta kepada Hakim agar si penjual diikutsertakan di dalam proses yang akan atau sedang berjalan, hal ini dalam hukum acara perdata dikenal dengan nama pengikutsertaan (*voeging*).¹⁸

Hukum perjanjian pada dasarnya merupakan hukum pelengkap maka kedua belah pihak diperbolehkan dengan janji-janji khusus memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang, bahkan mereka diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan wajib menanggung sesuatu apapun. Tentunya hal ini ada batasan-batasannya, antara lain :

- a) Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung suatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan olehnya, semua persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal (pasal 1494 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

¹⁸ www.hukumonline.com

b) Penjual dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi suatu penghukuman terhadap si pembeli untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelian, kecuali jika si pembeli pada waktu pembelian dilakukan, mengetahui tentang adanya putusan hakim untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu atau jika ia telah membeli barang itu dengan pernyataan tegas akan memikul sendiri untung ruginya (pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹⁹

Jika dijanjikan penanggungan atau jika tentang itu tidak ada suatu perjanjian si pembeli berhak dalam hal penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada orang lain maka pembeli menuntut kembalisi penjual :

- 1) pengembalian uang harga pembelian;
- 2) pengambilan hasil-hasil jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada si pemilik sejati yang melakukan tuntutan penyerahan;
- 3) biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan si pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh si penggugat;
- 4) penggantian kerugian sebesar biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya, sekadar itu telah dibayar oleh si pembeli (pasal 1509 Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata).

¹⁹ www.hukumonline.com

Jika pada waktu dijatuhkan hukuman untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain, barang itu telah merosot harganya maka si penjual tetap diwajibkan mengembalikan uang harga seutuhnya, sebaliknya jika barangnya pada waktu dijatuhkannya putusan untuk menyerahkan kepada yang lain, telah bertambah harganya meskipun tanpasesuatu perbuatan si pembeli, si penjual diwajibkan membayar kepada si pembeli apa yang melebihi harga pembelian itu juga.

Selanjutnya si penjual mengembalikan kepada si pembeli segala biaya yang telah dikeluarkan untuk pembetulan dan perbaikan yang perlu pada barangnya. Mengenai penanggungan (*“vrijwaring”*, *“warranty”*) ada suatu ketentuan yang perlu diperhatikan oleh pembeli yaitu pasal 1503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Jaminan terhadap suatu penuntutan hak menurut hukum berakhir, jika pembeli membiarkan diri dihukum oleh hakim dengan suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti tanpa memanggil penjual, dan penjual itu membuktikan bahwa ada alasan untuk menolak gugatan tersebut”.

Tentang kewajiban untuk menanggung cacat-cacat tersembunyi (*“verborgen gebreken”*, *“hidden defects”*) penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian itu sehingga ketika pembeli mengetahui cacat tersebut ia tidak akan membeli barang itu selain dengan harga yang kurang (pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Penjual tidak diwajibkan menanggung cacat yang

terlihat sebab tentu saja harga sudah disesuaikan dengan keadaan barang tersebut (pasal 1505 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata). Menurut pasal 1506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi walaupun dia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali si penjual dalam keadaan itu telah meminta untuk tidak menanggung cacat tersebut. Jika pembeli dalam posisi tersebut, ia dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali harga pembelian atau akan tetap memiliki barang tersebut sambil menuntut pengembalian sebagian harga (pasal 1507 Kitab Undang-Undang HukumPerdata).

Jika penjual sudah mengetahui cacat-cacat pada barang tersebut maka selain wajib mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti semua kerugian yang diderita oleh pembeli sebagai akibat cacat barang yang dibelinya (pasal 1508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Jika barang yang mengandung cacat-cacat tersembunyi itu musnah karena cacat-cacat itu, maka kerugian dipikul oleh penjual yang terhadap pembeli wajib mengembalikan uang harga pembelian dan menggantisegala kerugian lain, tetapi kerugian yang disebabkan kejadian yang tak disengaja, harus dipikul oleh pembeli (pasal 1510 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

b. Hak dan Kewajiban Pembeli

Mengenai hak dan kewajiban dari pembeli ini, pembeli wajib

membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang sudah ditetapkan dalam perjanjian. Harga tersebut harus berupa sejumlah uang. Meskipun dalam hal ini tidak dijelaskan dalam suatu pasal undang-undang, tetapi sudah ada dalam pengertian jual beli itu sendiri. Mengenai harga itu sendiri harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, tetapi juga diperbolehkan ada pihak ketiga untuk membantu memperkirakan penentuan harga atas barang tersebut (pasal 1465 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang tempat dan waktu pembayaran, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan (*levering*) barangnya harus dilakukan (pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Apabila si penjual tidak menyerahkan barangnya pada waktu yang telah ditetapkan, si pembeli dapat menuntut penyerahan itu, jika beralasan dengan tambahan pembayaran kerugian, atau ia dapat langsung menuntut pembayar kerugian sebagai pengganti penyerahan barang, ataupun ia dapat menuntut pembayaran perjanjian, yang dapat disertai pula dengan pembayaran kerugian. Apabila barang sudah diserahkan, si pembeli berhak menuntut si penjual untuk bertanggungjawab, jikalau ada seorang yang membantah hak milik si penjual atas barang yang telah dibeli, atau jika ternyata ada cacat yang tersembunyi. Apabila pembeli sampai terlibat dalam suatu perkara mengenai barang yang telah dibelinya itu, ia dapat meminta hakim untuk mengikutsertakan penjual untuk membela hak si pembeli. Tuntutan berdasarkan cacat-cacat yang tersembunyi harus dilakukan dalam waktu yang pendek, sebab jika sudah agak lama hakim

dapat menganggap si pembeli telah menerima baik barang yang bercacat itu.²⁰

3. Resiko Dalam Perjanjian Jual Beli

Terjadinya setiap perjanjian jual beli akan terasa cukup, jika kedua belah pihak sudah mencapai persetujuan tentang barang dan harganya. Sedangkan mengenai resiko dalam perjanjian jual beli menurut undang-undang sejak saat ditutupnya perjanjian, resiko mengenai barangnya sudah beralih kepada si pembeli, artinya jika barang itu rusak sehingga tidak dapat diserahkan kepada si pembeli, maka orang ini masih tetap harus membayar harganya. Ada dua macam resiko dalam perjanjian, yakni :

- a. Resiko secara sepihak sesuai dengan pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka baitu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.

- b. Resiko timbal balik sesuai dengan pasal 1460, pasal 1461 dan pasal 1462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : "Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya".

²⁰ Subekti, ibid. hlm. 162-163

Demikian juga bagi si penjual dia wajib menjaga barang yang menjadi objek jual beli tersebut sampai dilakukan penyerahan. Jika si penjual melalaikan kewajibannya, misalnya pada waktu yang ditetapkan belum menyerahkan barangnya, maka mulai saat itu ia menanggung resiko terhadap barang itu dan dapat dituntut untuk memberikan kerugian. Barang-barang yang dijual atas dasar beratnya, jumlahnya atau ukurannya, mulai menjadi tanggungan si pembeli setelah barang itu ditimbang, dihitung, atau diukur. Karena disaat baru mulai penimbangan, perhitungan atau pengukuran dianggap barang-barang tersebut disediakan untuk si pembeli.

Kata resiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.²¹ Pada dasarnya setiap orang memikul sendiri resiko atas kerugian yang menimpa barang miliknya, kecuali kalau kerugian itu dapat dipersalahkan kepada orang lain atau dengan membayarsejumlah uang untuk dilimpahkan kepada perusahaan asuransi. Namun dalam hal tidak ada pelimpahan kepada perusahaan asuransi resiko menjadi masalah, jika terjadi kerugian tetapi tidak ada yang dapat dipersalahkan. Hal ini berkaitan dengan masalah tidak dipenuhinya kewajiban debitur terhadap kreditur.²²

²¹ Subekti, ibid hlm.144

²² J. Satrio, 1999:233

4. Esensi Pasal 1320 KUHPerdara

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.

Pasal 18 ayat (1) UUIITE yang berbunyi “Transaksi elektronik yang di tuangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”.¹⁷ Para pihak yang saling mengikatkan diri berasal dari kesepakatan yang disetujui oleh masing masing pihak, seperti yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara mengenai kesepakatan para pihak yang diutamakan untuk melanjutkan setiap perbuatan dalam suatu perjanjian. Nilai dari pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian tidak seluruhnya terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Hanya terdapat beberapa kesesuaian yang dalam pasal 1320 KUHPerdara dengan isi dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE yaitu :

a. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan para pihak diperlukan dalam sebuah perjanjian termasuk dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui tokok online (*online shop*). Kesepakatan para pihak diatur dalam Pasal 19 tentang kesepakatan para pihak

untuk melakukan perjanjian dengan menggunakan sistem elektronik yang disepakati.

Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik di tegaskan dalam pasal 19 UUTE artinya dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dinyatakan bahwa dalam prakteknya perjanjian elektronik diperbolehkan atau sah dengan menggunakan alat elektronik misalnya dengan komputer atau dengan alat elektronik lainnya yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi antara penjual dan pembeli.

Setiap percakapan/komunikasi yang dilakukan melalui *Online Shop* antara para pihak yaitu penjual dan pembeli dapat dijadikan alat bukti dan sebagai salah satu alat pembuktian dalam menerangkan perjanjian yang dilakukan antar pihak dengan dasar kesepakatan bersama.

b. Kecakapan

Kecakapan dalam bertindak sangat diperlukan dalam suatu perjanjian. Termasuk dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui *took online*. Namun dalam Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE tidak diatur mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan transaksi ataupun mengakses informasi melalui media elektronik. Mengenai kecakapan memang tidak diatur dan dibatasi oleh undang-undang ini, Hal ini tentu tidak sesuai dengan nilai yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPdata, karena pengguna dari media elektronik ditujukan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang luas dan tanpa batas.

Kecakapan para pihak yang melakukan transaksi melalui media Android atau media elektronik lainnya tidak dipermasalahkan para pihak maka dengan kesepakatan tersebut transaksi jual beli dapat di lanjutkan, tapi juga dapat dibatalkan jika memang diinginkan para pihak atau salah satu pihak.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok dari suatu transaksi jual beli, inti dari suatu transaksi jual beli adalah mengenai objek atau barang yang akan diperjualbelikan. Suatu hal tertentu merupakan suatu benda yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli oleh penjual. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dijelaskan dalam pasal 9 bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk harus menyediakan informasi yang lengkap dan jelas mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Jadi dalam pasal ini di jelaskan bahwa suatu hal tertentu tersebut harus ditentukan jenis produk yang ditawarkan.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Dalam suatu transaksi jual beli, hal yang paling perlu diingat adalah barang yang menjadi objek jual beli tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang berlawanan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik yang dapat merugikan orang lain, baik mengenai informasi sampai kepada sistem transaksi, tidak

boleh bertentangan dengan Undang-undang ITE yang terdapat dalam BAB VII mengenai perbuatan yang dilarang. Jika dalam transaksi jual beli melalui toko online maupun melalui media elektronik lainnya hal ini dilanggar, maka kesepakatan perjanjian untuk melakukan transaksi jual beli dapat batal demi hukum.

B. Tinjauan Umum Konsumen, Pelaku Usaha, Barang, dan Perlindungan Konsumen

Rumusan pengertian perlindungan konsumen disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada konsumen”. Rumusan pengertian tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.²³

1. Pengertian Konsumen

Definisi konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 Nomor 8 Tahun 1999 adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumsi, dari bahasa Belanda *consumptie*, ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda,

²³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (cet. 6; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 4

baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor. Pada masa sekarang ini bukan suatu rahasia lagi bahwa sebenarnya konsumen adalah raja sebenarnya, oleh karena itu produsen yang memiliki prinsip holistic marketing sudah seharusnya memperhatikan semua yang menjadi hak-hak konsumen.²⁴

2. Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

²⁴ Jeanus sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 70

sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Dari kedua pengertian tersebut terdapat kesamaan dari pengertian pelaku usaha.²⁵

Pada penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain. Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Pengertian pelaku usaha di atas merupakan pengertian yang sangattang luas karena meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan konsumen, dalam arti banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *directive*, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa yang akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.²⁶ Dalam pasal 3 *Directive* ditentukan bahwa:

- a. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen
- b. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau

²⁵ Adiman pangari,” *Pengertian Konsumen*” [http: //www.Adiman pangaribuan. Blogspot. com /2012/06/ pengertian-konsumen.html](http://www.Adiman pangaribuan. Blogspot. com /2012/06/ pengertian-konsumen.html), diakses tanggal 14 April 2019 jam 20.34

²⁶ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, hlm. 180

- setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti *directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.
- c. Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan.
- d. Oleh karena istilah pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen meliputi berbagai bentuk/jenis usaha yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili didalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi diluar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri dan apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.²⁷

²⁷ *Ibid.*, hlm. 9-10

3. Barang

Barang didefinisikan sebagai suatu produk fisik (berwujud, *tangible*) yang dapat diberikan pada seorang pembeli dan melibatkan perpindahan kepemilikan dari penjual ke pelanggan, kebalikan dengan suatu jasa (tak berwujud, *intangible*). Istilah "komoditas" sering digunakan dalam mikroekonomi untuk membedakan barang dan jasa.²⁸ Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, barang “adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”.

Barang yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Kayu. Kayu merupakan produk biologi yang serba guna dan telah lama dikenal dan dimanfaatkan, baik untuk alat rumah tangga, senjata maupun sebagai bahan bangunan. Sebagai bahan bangunan kayu masih banyak digunakan karena harganya relatif murah dibanding bahan bangunan lainnya. Di samping mudah untuk dikerjakan dan penampilannya dekoratif, kayu merupakan bahan yang bisa diperbaharui (*renewable*).

Pasokan kayu yang berasal dari hutan alam sebagai penghasil industri semakin berkurang. Saat ini banyak ditanam jati cepat tumbuh yang diharapkan kayunya dapat digunakan sebagai kayu pertukangan, pengganti kayu dari hutan alam. Sementara kayu yang berasal pohon cepat tumbuh cenderung mempunyai sifat kurang baik. Kayu berasal dari hutan alam mempunyai sifat dasar yang

²⁸ Wikipedia,” *Pengertian Barang*” <https://id.wikipedia.org/wiki/Barang>, diakses tanggal 14 juni 2019 jam 20.34

lebih baik bila dibandingkan dengan kayu hutan tanaman. Hal ini kemungkinan berlaku bagi kayu jati cepat tumbuh. Kayu jati (*Tectona grandis*) di Indonesia telah ditanam sejak jaman Belanda dan telah dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat terutama untuk bahan bangunan dan mebel. Bahkan di Jawa tanaman tersebut telah menjadi kelas perusahaan tersendiri sejak jaman Belanda. Dengan kemajuan teknologi yang berkembang akhir-akhir ini, perbanyakkan bibit jati yang semula hanya meng andalkan biji, dikembangkan dengan cara kultur jaringan atau lebih dikenal dengan “*tissue culture*”. Tujuan dari kultur jaring an adalah untuk memproduksi bibit secara cepat, dalam jumlah banyak dari bibit tanaman yang dinilai mempunyai sifat baik dan unggul. Kayu jati super adalah kayu jati hasil kultur jaringan dan telah dikembangkan di Indonesia.

4. Jasa

Secara umum, jasa adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasar mata dan satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, di mana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut. Dalam pengertian yang lain, jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasi, yang bersifat tak teraba, yang direncanakan untuk pemenuhan kepuasan konsumen. Untuk menghasilkan jasa mungkin perlu atau mungkin juga tidak perlu penggunaan barang yang berwujud. Walaupun diperlukan barang berwujud, akan tetapi tidak terdapat pemindahan hak milik atas benda tersebut. Jasa terdiri dari tindakan dan interaksi yang merupakan kontak sosial. Jasa lebih dan sekadar hasil sesuatu yang tak terhalang, dan jasa merupakan interaksi sosial antara produsen dan konsumen”.

5. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, yang bermula dari ”benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman dan segala kebutuhan diantara keduanya”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.²⁹

Di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu,

²⁹ Yoga, ”Hukum Perlindungan Konsumen” <http://www.mardyantongara.wordpress.com/2013/04/16/perlindungan-konsumen.html>, diakses tanggal 23 Juli 2019 jam 08.22

globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsum. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen yaitu pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam dan sebagainya.³⁰

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

³⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Medan : Kencana, 2013, hlm 14

untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.³¹

b. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bias memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat. Asas perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen yaitu:³²

1) Asas manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias

³¹ Jeanus Sidabalok, *op.cit.*, hlm.46

³² M Sadar, Moh Taufik, Habloel Mawadi, *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Akademia, 2012, hlm 25

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

c. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dan sekaligus usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan mengenai tujuan konsumen, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen tersebut seolah-olah disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Padahal, pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan diatas tetapi dengan melihat pada kepentinganya. Misalnya, tujuan meningkatkan kualitas barang, Realisasinya tidaklah harus menunggu tujuan awal perlindungan konsumen itu tercapai ialah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara simultan atau bersamaan. Dengan memperhatikan kepentingan dan keperluan konsumen di berbagai negara, khususnya di negara-negara sedang

berkembang, harus diakui bahwa konsumen mengalami kondisi ketidakseimbangan ekonomi, tingkat pendidikan, daya tawar menawar, dan dengan memperhatikan bahwa pada dasarnya konsumen mempunyai hak terhadap produk yang aman dan tidak berbahaya, juga mempunyai hak untuk memajukan pembangunan sosial ekonomi dan perlindungan lingkungan secara adil dan berkesinambungan, maka pengaturan perlindungan konsumen ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Membantu pemerintah mencapai dan mempertahankan perlindungan yang memadai bagi masyarakat sebagai konsumen.
- 2) Memfasilitasi pola produksi dan distribusi yang responsive terhadap kebutuhan konsumen.
- 3) Membuat kode etik produksi serta distribusi barang dan jasa kepada konsumen.
- 4) Membantu pemerintah mencegah praktik bisnis yang kotor dari seluruh pelaku usaha secara nasional dan internasional yang berdampak pada konsumen.
- 5) Memfasilitasi pembuatan lembaga konsumen independen.
- 6) Mewujudkan kerjasama internasional dalam bidang perlindungan konsumen.
- 7) Membangun kondisi pasar yang memberikan kesempatan kepada konsumen dengan pilihan yang luas dengan harga yang murah.
- 8) Meningkatkan konsumsi yang berkelanjutan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Jual Beli Kayu Jati Secara Online

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki toko dalam situs tertentu di dunia maya (internet) saat ini semakin meningkat menggunakan *e-commerce*, khususnya jenis *business to customer* yang melakukan penawaran adalah *merchant* atau produsen/penjual. Para *merchant* atau penjual tersebut memanfaatkan toko *online* dalam *website* untuk menjajakan produk dalam hal ini kayu jati. Para penjual ini menyediakan semacam *storefront* yang berisikan katalog produk dan pelayanan yang diberikan dan para pembeli seperti berjalan-jalan di depan toko-toko dan melihat-lihat barang-barang di dalam etalase.

Toko *online* dalam *website* tersebut biasanya di tampilkan barang-barang yang ditawarkan, harganya, nilai *rating* atau *poll* otomatis tentang barang itu yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi tentang barang tersebut dan menu produk lain yang berhubungan, dan penawaran tersebut terbuka bagi semua orang sehingga semua orang yang tertarik dapat melakukan *window shopping* di toko-toko *online* ini. Tawaran ini adalah pernyataan mengenai syarat-syarat yang dikehendaki oleh penawar supaya mengikat, jika suatu tawaran diterima sebagaimana adanya berarti persetujuan itu tercapai. Dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* ini, suatu tawaran boleh dilakukan terhadap seseorang tertentu dan hanya terbuka baginya untuk menerimanya. Selain itu tawaran juga boleh diberikan dan hanya terbuka kepada kelompok dan dalam hal ini hanya orang-orang yang tergabung dalam kelompok itu saja yang diperbolehkan untuk

menerima tawaran tersebut. Dalam proses penawaran, penjual juga mesti beritikad baik di dalam memberikan informasi mengenai barang yang diperdagangkan melalui *e-commerce* tersebut. Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran

1. Syarat Sahnya Jual Beli Online

Setiap subjek hukum memiliki kewenangannya untuk melakukan suatu tindakan hukum adalah mengemban hak dan kewajiban hukum. Agar terbentuknya suatu perbuatan hukum maka di isyaratkan terbentuknya suatu tindakan hukum yang dapat menghidupkan kewenangan tersebut. Di dalam pembuatan suatu perjanjian termasuk peristiwa perjanjian yang dilakukan secara online atau transaksi elektronik yang dilakukan melalui sosial media dengan *system e-commerce*. Artinya *market* atau perdagangan dengan menggunakan fasilitas berbasis elektronik yang terhubung dengan internet ini dimana transaksi perdagangannya baik penjual maupun pembelinya harus melalui system elektronik yang ada jaringan internetnya.³³ Akan tetapi didalam keabsahan suatu kontrak atau suatu perjanjian harus diukur dengan terpenuhinya klausul-klausul yang telah disepakati oleh para pihak (*expression of will*). Meskipun demikian keabsahan dari para pihak sangatlah di pertanyakan dalam melakukan transaksi jual beli secara online yang berbasis elektronik,

³³ Triton PB, 2006, *Mengenal E-Commerce dan Basis di Dunia Cyber*, Argo Publisher, Yogyakarta, h.16.

dikarenakan antara si penjual dan si pembeli tidak melakukan pertemuan terlebih dahulu, dengan melakukan perjanjiannya melewati media elektronik saja.

Peristiwa seperti ini jelas tidak dapat diketahui secara jelas kedua belah pihak sudah cakap atau tidak menurut undang-undang. Untuk itu keabsahan dalam peristiwa perjanjian jual beli online tidak sah, karena banyak kemungkinan para pihaknya ada yang belum berusia 21 tahun dan para pihaknya tidak pernah melakukan pertemuan secara langsung. Karena jika tidak mengindahkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hanya mengacu pada undang-undang ITE saja maka bisa dipastikan perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua pihak akan bermasalah dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Atau ada pula agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar jual beli dianggap sah, sebagai berikut:

- a. Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
 - 1) Objek / Perihal tertentu
 - 2) Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan
- b. Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
 - 1) Adanya kesepakatan dan kehendak
 - 2) Wenang berbuat
- c. Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata
 - 1) Kontrak harus dilakukan dengan I'tikad baik
 - 2) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
 - 3) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan

4) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

d. Syarat sah yang khusus

- 1) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
- 2) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
- 3) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
- 4) Syarat izin dari pejabat

2. Pembelian Kayu Jati Melalui Toko Online Perhutani

Cara membeli Kayu produk Perhutani dapat dilakukan melalui toko online yang dapat diakses oleh pembeli kapan saja dan dimana saja dengan menggunakan *smartphone* yang terkoneksi internet. Selama ini mindset membeli kayu perhutani adalah ribet, harus lelang, harus mengurus surat-surat, bahkan harus menggunakan perantara orang lain. Namun saat ini perhutani sedang merubah sistem yang berkembang mengikuti zaman. Customer yang ingin membeli kayu perhutani atau bahkan produk kayu perhutani lainnya seperti gondorukem, terpentin, dan minyak kayu putih dipermudah dengan aplikasi toko perhutani dan juga melalui website *tokoperhutani.com*. Ini mempermudah proses pembelian dan juga transparan, membuat pembelian kayu perhutani semakin mudah.

Registasi adalah persyaratan awal yang harus dilakukan saat ingin membeli kayu perhutani, pembelian bisa dilakukan oleh perorangan dan juga perusahaan. Cara beli kayu perhutani dapat dilakukan setiap hari mulai pukul 02.00 s/d 23.00 WIB sedangkan pelayanan pengambilan dilakukan pada saat jam kerja.

Sebelum mengajukan pembelian kayu online Perum Perhutani, pembeli wajib melakukan registrasi baik untuk pembelian kayu retail, pembelian kontrak,

maupun lelang premium. Ada dua jenis registrasi, yakni registrasi pembeli perorangan dan registrasi pembeli perusahaan atau badan usaha.

a. Registrasi tipe pembeli Perseorangan

Data yang perlu diisikan pada saat registrasi terdiri dari:

- 1) Nama lengkap
- 2) Email,
- 3) Tanggal Lahir,
- 4) No Telepon/HP
- 5) No KTP,
- 6) No NPWP (tidak wajib).
- 7) Pembeli perseorangan wajib melakukan upload Foto KTP dan NPWP (jika ada) ke sistem pembelian kayu online Perum Perhutani. Dokumen atau Foto yang di upload minimal berkapasitas 300KB. Apabila data registrasi tidak lengkap, maka akun member baru yang di register tidak dapat dilakukan validasi.

b. Registrasi tipe pembeli Perusahaan

Data yang perlu diisikan pada saat registrasi terdiri dari:

- 1) Nama Lengkap,
- 2) Email,
- 3) Tanggal Lahir,
- 4) No Telepon/*handphone aktif*
- 5) No KTP,
- 6) No NPWP,
- 7) Nama Perusahaan,

- 8) Jabatan,
- 9) No SIUP,
- 10) No IUPHHK,
- 11) No Kartu Ganis.
- 12) Pembeli perusahaan wajib melakukan upload Dokumen
 - a) SIUP Asli,
 - b) IUPHHK Asli,
 - c) KTP Asli,
 - d) Kartu Ganis
 - e) Pemilik perusahaan atau surat kuasa pengurusan dan NPWP Asli ke sistem pembelian kayu online Perum Perhutani.
 - f) Dokumen atau Foto yang di upload minimal berkapasitas 300KB.
 - g) Apabila data registrasi tidak lengkap, maka akun member baru yang di register tidak dapat dilakukan validasi. (Untuk Perusahaan yang tidak untuk mengajukan Penjualan Online Toko Perhutani Kontrak IUPHHK bisa diganti TDP)
- c. Pembeli yang sudah sukses melakukan registrasi akan menerima notifikasi *username* dan *password* melalui email dan/atau sms.
- d. Untuk keamanan data, pembeli dianjurkan melakukan penggantian *password* secara berkala dan menjaga kerahasiaan *password*. Perum Perhutani tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan *username* dan *password*.
- e. Registrasi tipe pembeli perorangan hanya diperbolehkan 1 *username* saja.

- f. Registrasi tipe pembeli perusahaan hanya diperbolehkan maksimum 5 perusahaan 5 *username* dan 5 perusahaan hanya diperbolehkan memberikan surat kuasa maksimum kepada 5 orang.
- g. Untuk memastikan validasi dokumen, Admin Toko Perhutani akan melakukan pengecekan file dokumen yang diupload dengan isian form registrasi. (KTP, NPWP, SIUP, IUIPHHK, Kartu Ganis).
- h. Khusus untuk dokumen surat kuasa dari perusahaan pemberi kuasa kepada yang dikuasakan harus divalidasi kepada perusahaan pemberi kuasa.
- i. Pembeli Perusahaan yang mengajukan Permohonan Pembelian Kayu melalui Kontrak akan diverifikasi lanjutan oleh General Manager terkait kevalidan (KTP, NPWP, SIUP, IUIPHHK, Kartu Ganis dan Surat Kuasa bagi Penerima Kuasa)
- j. *Username* dan *password* menjadi tanggungjawab pemilik. Perum Perhutani tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penyalahgunaan username dan password

3. Pembayaran

Toko online website *tokoperhutani.com*. menerima pembayaran atas pembelian kayu jati produk Perhutani melalui dua cara, yaitu melalui pembayaran *Finpay* (Telkom 021) dan *Virtual Account* (VA) :

- a. Pembayaran *Finpay* (Telkom 021), khusus untuk transaksi akun perorangan dan perusahaan dengan nilai transaksi pembelian kayu di bawah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- b. *Virtual Account* (VA), untuk akun perorangan dan perusahaan dengan transaksi pembelian kayu di atas Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

c. Pembayaran Finpay (Telkom 021) dapat dilakukan setiap hari pada pukul 08:00 s/d 22:00 WIB

d. Transfer via Virtual Account (VA) melalui bank yang sama dapat dilakukan pada:

1) Senin - Jumat pada pukul 08:00 s/d 21:00 WIB

2) Sabtu, Minggu dan Libur Nasional pada pukul 08:00 s/d 16:00 WIB

3) Pembayaran melalui Finpay (Telkom 021) dapat dilakukan melalui:

a) ATM BCA, ATM Danamon, ATM BNI, ATM BII, ATM OCBC NISP,

b) I-Banking Mandiri, I-Banking BNI, Klik BCA,

c) Alfamart, Indomaret, & Kantor POS.

e. Cara Pembayaran Melalui ATM

1) ATM BCA

2) Pilih Menu Transaksi Lain

3) Pilih Transaksi Pembayaran.

4) Pilih Jenis Pembayaran Telepon/Handphone.

5) Pilih Operator Telepon Telkom.

6) Masukkan "021xxxxxxxxx" 13 digit kode pembayaran yang pembeli dapatkan.

7) Pilih YA untuk melanjutkan pembayaran.

f. Cara Pembayaran Melalui Internet Banking

1) INTERNET BANKING MANDIRI

2) Login ke internet banking Mandiri.

3) Pilih menu pembayaran.

4) Pilih jenis pembayaran Telkom.

- 5) Pilih provider Telkom.
- 6) Masukkan 4 digit awal kode pembayaran yang anda dapatkan pada kode area (021x).
- 7) Masukkan 9 digit kode pembayaran terakhir yang anda dapatkan.
- 8) Klik Lanjutkan.
- 9) Masukkan challenge code ke token.
- 10) Masukkan kode token internet banking Mandiri, Klik Submit.

g. Cara Pembayaran Melalui Indomaret / Alfamart

- 1) Silahkan pergi ke gerai indomaret / alfamart terdekat dan bayar kepada kasir dengan menyebutkan "Pembayaran Jasa Telkom - Finpay
- 2) Memberikan kode pembayaran yang anda dapat pada saat pemesanan tanpa menggunakan angka 0 di depannya, misalnya "021xxxxxxxxxx" (13 digit)
- 3) Bukti pembayaran disimpan dan dikirim ke penjual

h. Pembayaran melalui Virtual Account

Untuk pembayaran melalui Virtual Account harus melalui bank yang sama yaitu:

- 1) Bank BNI.

Langkah-langkah Virtual Account untuk sesama ATM BNI:

a) Transfer

- (1) Pilih Rekening Sumber Dana
- (2) Pilih tujuan transfer ke Rekening BNI
- (3) Ketik Nomor Rekening Virtual Account
- (4) Ketik nominal transfer

(5) Konfirmasi Pemindahbukuan

b) Selesai

2) Untuk Virtual Account ke Bank lain sebagai berikut:

a) Transfer

(1) Pilih Rekening Sumber Dana

(2) Pilih tujuan transfer ke Rekening BNI

(3) Ketik Kode Bank diikuti Nomor Rekening Virtual Account

(4) Ketik nominal transfer

(5) Ketik Nomor Referensi (boleh dikosongkan)

(6) Konfirmasi Transfer ATM Bersama

b) Selesai.

3) Bank BCA

Cara bayar melalui Virtual Account BCA:

a) Pilih 'Transaksi Lain'

b) Pilih 'Transfer'

c) Pilih 'Ke Rekening BCA'

d) Masukkan nominal yang ingin dibayarkan

e) Masukkan nomor Virtual Account BCA

f) Konfirmasi pembayaran anda

g) Pembayaran selesai.

4) Bank Mandiri

Dalam menu pembayaran *multi payment*, untuk melakukan pembayaran *multi payment* :

a) Masukan kode perusahaan.

- b) Tekan tombol 'BENAR' untuk melanjutkan atau tombol 'SALAH' untuk mengulangi.
 - c) Untuk melihat daftar kode perusahaan / intitusi tekan 'DAFTAR KODE'
 - d) Masukkan Nomor Referensi Pembayaran Anda
 - e) Tekan tombol 'BENAR' untuk melanjutkan atau tombol 'SALAH' untuk mengulangi.
 - f) Untuk membatalkan tekan 'CANCEL'
 - g) Periksa seluruh informasi yang ada pada screen konfirmasi.
 - h) Jika benar tekan tombol 'BENAR' untuk melakukan eksekusi atau tombol 'SALAH' untuk melakukan pembatalan.
 - i) Tunggu respon dari system Mandiri atm untuk status transaksi Anda
 - j) Pada layar akan tampil informasi transaksi telah selesai dan konfirmasi untuk melakukan transaksi lainnya :
 - k) Tekan tombol 'BAYAR/BELI' jika ingin kembali ke menu Pembayaran
 - l) Tekan tombol 'MENU UTAMA' jika ingin kembali ke menu Utama.
 - m) Atau tekan tombol 'SELESAI' jika tidak ingin melakukan transaksi lainnya, dan kartu.
- 5) Bank BRI
- Tahapan pembayaran BRIVA :
- a) silahkan pilih menu Transaksi lain
 - b) Pembayaran Lainnya BRIVA
 - c) Masukkan nomor BRIVA

- d) Masukkan jumlah pembayaran
- e) Selesai

4. Kuitansi Pembayaran

Dalam berbisnis, kwitansi merupakan satu-satunya dokumen yang paling penting diberikan. Sebab dalam bisnis skala besar maupun kecil, dokumen ini penting untuk diberikan sebagai tanda pembayaran telah dilakukan. Lebih lanjut, kuitansi (dalam bahasa Indonesia) juga mempunyai kekuatan hukum jika dibubuhi dengan materai. Setelah pembeli membayar harga kayu yang dipilih dalam penjual toko online perhutani dengan cara pembayaran secara finpay ataupun *virtual account*, maka penjual menerbitkan kwitansi atas nama pembeli dan data kayu jati yang akan dikirim kepada pembeli.

Kuitansi dipahami sebagai sebuah dokumen tanda bukti sebuah pembayaran telah dilakukan maupun penerimaan uang. Biasanya, dokumen ini ditandatangani oleh penjual dan diterima oleh pembelinya. Atau dalam hal tertentu, kedua belah pihak juga memperkuat sisi legalitas. Dokumen ini dibuat untuk memudahkan pencatatan arus kas dalam pembukuan. Beberapa hal yang harus ada di dalam kuitansi adalah kop perusahaan, nomor, nama penjual, nama pembeli, jumlah uang dalam nominal dan angka. Untuk lebih kuat dalam segi hukum, diperlukan tanda tangan dan materainya. Dalam kasus besar, materai memang menjadi syarat mutlak agar keputusan yang dihasilkan menjadi lebih adil untuk kedua belah pihak. Adapun salah satu contoh kuitansi yang dari penjual adalah sebagai berikut :

Gambar 1
Dokumentasi Kuitansi dari Penjual (Perum Perhutani)

PERHUTANI
PERUM PERHUTANI

Indonesian LEGAL Wood
040-LPPHPL-013-IDN

KUITANSI

NO INVOICE : 39142008292255

GM 1-PEKALONGAN
Sudah Terima Dari
Received from

Banyaknya Uang
Amount Of

Untuk Pembayaran
Payment For

: VERNYA KUSUMA WARDANI
Jl. Raya prupuk utara Rt 01 Rw 04 kel. Prupuk Utara Kec. Margasari
Kab. Jember

: tiga puluh juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh enam
rupiah

Jenis Kayu	Jumlah Volume	Jumlah Batang
JATI	5.900000	39

Jumlah Rp **30.320.356,00**

Note: Nominal pembayaran dimasukkan secara manual sesuai dengan jumlah tagihan setelah PPN.

Kuitansi pembayaran dari pembeli dapat dibuat dengan menggunakan kertas ataupun digital. Saat ini, penggunaan kuitansi secara digital sudah lumrah digunakan apalagi bisa dikirim lebih cepat dengan menggunakan *email* atau bahkan *whatsapp*. Namun, kuitansi bukanlah satu-satunya kegiatan dalam bisnis yang bisa diselesaikan secara digital.

5. Kompalin dan Klaim Barang (Kayu Jati) Yang Dibeli.

Dalam praktik, pembelian kayu jati secara online dapat dilakukan dengan Cara pembayaran transaksi Penjualan Online Toko Perhutani (POTP) pada situs www.tokoperhutani.com. Adapun beberapa ketentuan mengenai kompalin dan klaim barang (kayu jati) yang dibeli.

Memperhatikan karakteristik kayu yang rawan rusak maka kayu-kayu yang sudah diangkut tidak dapat dikembalikan dan atau ditukar. Komplain dan klaim barang dapat dilakukan pada saat barang belum dimuat maksimal 2 x 24

jam dari transaksi pembayaran.

Komplain dan Klaim barang yang dibeli dapat disampaikan kepada *Contact Center* melalui telepon 1500-235 atau email ke: *contact_center@perhutani.co.id*. Setelah mendapatkan konfirmasi/ pemberitahuan dari *Contact Center Customer*/Pembeli dapat datang ke Kantor Manager Komersial Kayu untuk penyelesaian tindaklanjut. Apabila kayu yang dibeli terjadi komplain/klaim karena mutu dan ukuran, maka akan dilakukan pengecekan oleh Jajaran Manager Pemasaran dan Jajaran Penguji Tk. I dan atau Penguji Tk. II berdasarkan aturan SNI yang berlaku. Pengecekan maksimal 7 hari kerja semenjak komplain/klaim diajukan.

Jika memang terbukti (valid) terdapat kayu yang tidak sesuai dengan SNI, maka akan di BAP bersama oleh Kepala TPK, Penguji Tk II, Asman Adum & Keu, Penguji Tk. I dan Asman Penjualan mengetahui Manager Komersial Kayu.

BAP Bersama akan digunakan sebagai dasar pengembalian (refund) atau perhitungan selisih harga atas mutu kayu setelah dilakukan pengecekan bersama maksimal 30 hari kalendar. Apabila pembeli menghendaki pengembalian (refund) maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar 10 % dari harga pembelian. Dalam hal terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh sistem IT Toko Perhutani, akan dilakukan pengembalian (refund) tanpa dikenakan biaya administrasi. Dan dibuatkan BAP bersama oleh Admin wilayah, Kaur Data-IT, Asman Adum & Keu, Asman Penjualan mengetahui Manager Komersial Kayu. Apabila terjadi komplain akibat keterlambatan pelayanan e-SKSHHK yang disebabkan gangguan jaringan SIPUHH Online dapat memakai dokumen pengganti sesuai SK Dirjen PHPL No. P.3/PHPL-IPHH-2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Dirjen PHPL No. P.18/PHPL-SET-2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi. Pasal 22 point. 4

B. Perlindungan Hukum Pembeli dan Penjual dalam Transaksi Jual Beli Kayu Jati secara Online

Kegiatan jual beli secara *online* merupakan cara baru, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang saat ini. sebab dapat memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan berbelanja. Transaksi *online* menjadi pilihan karena memiliki keunggulan antara lain lebih praktis serta mudah dan dapat dilakukan kapanpun selama memiliki koneksi internet, namun di sisi lain memiliki dampak negatif yaitu timbulnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.³⁴

Kemungkinan terjadinya kasus penipuan juga begitu besar, disebabkan oleh kurangnya informasi yang seringkali diterima oleh konsumen. Walaupun secara keabsahan proses transaksi sudah dijelaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pada pasal 1458 yang menyebutkan : “Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, maupun harganya belum dibayar”.

³⁴ Husni Syawali dan Neni Sri Maniyati, 2000, *Aspek Hukum Transaksi Online*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000hlm. 41

Dalam praktik, setiap pembeli yang telah membayar sejumlah uang tertentu untuk membeli kayu jati itu menerima kuitansi bukti bayar atas pembelian sejumlah kayu yang ditawarkan melalui toko *online*

Jelas ini menjadi pekerjaan tambahan untuk memberi rasa nyaman untuk kedua belah pihak baik penjual maupun konsumen. Oleh karena itu, keperluan adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi *online* sangat diperlukan terutama karena konsumen memiliki hak secara universal harus dilindungi yakni hak atas keamanan dan keselamatan serta hak atas informasi yang benar.

Di Indonesia saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai transaksi *online*. Begitu pula dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE yang belum dapat digunakan sebagai dasar menangani kasus penipuan dalam transaksi *online* di Indonesia. Undang-undang di Indonesia saat ini yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, meskipun di dalamnya tidak secara khusus mengatur transaksi *online*.

Beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus penipuan pada transaksi *online* adalah sebagai berikut :

1. Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, dan f yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak

sesuai dengan mutu, kondisi maupun janji sebagaimana dinyatakan dalam label, keterangan, iklan maupun promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

2. Pasal 16 huruf a dan b yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan serta dilarang untuk tidak menepati janji atas suatu pelayananan dan/atau prestasi.

Berdasarkan akan apa yang sudah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu adanya kepastian hukum terhadap perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi *online*. Selain dikarenakan konsumen memiliki hak-hak yang penting untuk ditegakkan, tetapi juga demi menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar tidak melakukan penipuan terhadap konsumen. Dengan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Dalam hal ini di samping keberadaan UUPK, regulasi yang secara khusus mengatur tentang kegiatan jual beli *online* diperlukan karena tidak hanya dapat memberikan perlindungan bagi konsumen tetapi juga pelaku bisnis *online*.

Hubungan hukum yang terjadi dalam jual beli konvensional hanya melibatkan antara dua pihak saja yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Hubungan hukum tersebut berupa perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban penjual dan juga hak dan kewajiban pembeli. Apabila perjanjian jual beli dilakukan secara konvensional, pembeli atau konsumen memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen atau yang disingkat UUPK. Begitupun dengan hak dan kewajiban dari penjual atau pelaku usaha yang juga dilindungi oleh UUPK.

1. Hak Konsumen

Hak konsumen dalam hal ini adalah hak pembeli kayu jati melalui tokok online.

Apabila merujuk pada Pasal 4 UUPK mengatur bahwa hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang (kayu jati) dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- g. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Konsumen (pembeli kayu)

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1999 yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Hak Pelaku Usaha (Perum Perhutani)

Begitu pun juga dengan hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad buruk.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 22 Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1999 penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha yang di atur di dalam UUPK dapat terlihat secara jelas hubungan hukum yang terjadi antara keduanya. Namun secara sederhana hubungan hukum yang terjadi antara para pihak di dalam perjanjian jual beli adalah pelaku usaha atau penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli atau konsumen, begitu pun dengan konsumen atau pembeli menyerahkan pembayaran sesuai dengan nilai jual yang telah disepakati. Sehingga apabila salah satu pihak tidak melakukan

apa yang telah diperjanjikan, maka pihak tersebut telah melakukan cidera janji atau biasa disebut dengan wanprestasi.

Jual beli yang dilakukan secara *online* melibatkan setidaknya empat pihak yaitu *buyer*, *seller*, rekber dan kaskus. Namun dari keempat pihak tersebut, pihak-pihak yang terlibat secara langsung adalah *buyer*, *seller*, dan rekening bersama. Kaskus sendiri tidak terlibat secara langsung dalam transaksi yang dilakukan antara *buyer*, *seller*, dan rekber.

Perlindungan hukum bagi pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) dalam perjanjian jual beli online melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus adalah: diatur dalam UUPK yakni: pada Pasal 4 mengenai hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai barang dan mendapatkan ganti rugi, Pasal 5 mengenai kewajiban konsumen antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, dan membayar sesuai kesepakatan, Pasal 6 mengenai hak pelaku usaha antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk, dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya, Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang, dan memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang yang diperdagangkan. Keabsahan perjanjian jual beli online melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus adalah: sah karena memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian yaitu: kesepakatan, cakupan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Meskipun dalam hal cakupan tidak terpenuhi, tidak membuat perjanjian itu

sendiri halal, melainkan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak mengajukan untuk dilakukan pembatalan. Kata kunci: Perjanjian jual beli online melalui rekening bersama. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) yang menggunakan rekening bersama, dan juga untuk mengetahui dan memahami keabsahan perjanjian jual beli online melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus. Berdasarkan hasil penelitian dipahami perlindungan hukum bagi pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) dalam perjanjian jual beli online melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus adalah: diatur dalam UUPK yakni: pada Pasal 4 mengenai hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai barang dan mendapatkan ganti rugi, Pasal 5 mengenai kewajiban konsumen antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, dan membayar sesuai kesepakatan, Pasal 6 mengenai hak pelaku usaha antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk, dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya, Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang, dan memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang yang diperdagangkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai keabsahan jual beli kayu jati secara online dan perlindungan hukumnya antara lain sebagai berikut.

1. Istilah jual beli pada dasarnya merupakan '*contract of sale*', adapun definisi perjanjian jual beli apabila merujuk Pasal 1457 KUHPdata, "jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak 1 mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain (pihak 2) untuk membayar harga yang dijanjikan. Esensinya penyerahan benda dan membayar harga. Keabsahan transaksi pembelian kayu jati di Website Toko Online Perhutani pada dasarnya memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 BW. Dasar keabsahan terjadi apabila pihak penjual dan pembeli sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Keabsahan sendiri terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian dimana pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayarkan secara bertahap dari harga yang disepakati.
2. Perlindungan hukum pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli kayu jati secara online, terpenuhinya kewajiban ini berarti telah terjadi pelanggaran hak bagi pihak lain (pembeli) dan akibat hukumnya adalah menimbulkan kerugian. Perlindungan hukum didasarkan pada Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi ini memberikan payung hukum terhadap orang-orang yang merasa dirugikan terhadap kegiatan *ecommerce*. Pengesahan UU ITE pada tahun 2008 merupakan bentuk dari keseriusan Indonesia untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan sengketa-sengketa yang terjadi melalui media teknologi informasi, yang bermuara pada pencapaian nilai keadilan dan kemanfaatan.

B. Saran

1. Dalam perkembangan transaksi jual beli dan munculnya Undang undang No. 1 tahun 2008 Tentang ITE sebagaimana telah dirubah menjadi Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE merupakan titik terang dan dapat dikatakan Undang-undang pertama kali yang mengatur tentang Hukum *Cyber*, dalam perkembangan transaksi jual beli dan perkembangan hukum yang ada hendaknya Undang-undang ITE dapat disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat agar dapat memahami dan mengetahui tentang keabsahan perjanjian yang dilakukan dalam transaksi jual beli melalui Android ataupun media elektronik lainnya.
2. Diharapkan kepada para pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi dalam dunia bisnis dan usaha sekiranya dapat mematuhi hukum dan peraturan yang ada sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan yang dapat menciderai isi perjanjian yang dibuat dalam transaksi jual beli yang dilakukan dalam media internet, Android atau media elektronik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Achmad Yulianto dan Fajar Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Afrilian Perdana, Dahlan dan Mahfud, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No.1, 2014.
- Alkotsar, Artidjo. *Metode Penelitian Hukum Profetik*. Yogyakarta: FH UII Press. 2018.
- Asyhadie Zaeni. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*. Depok: PT.RajaGrafindo Persada. 2019.
- Bakti Shofiyullah dkk., *E-Commerce dalam hukum islam* *Dinamika Hukum* Vol 21 no 2 Agustus 2018, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol.XVII, September–Desember 2008, No.3.
- Butar Butar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Unruk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Chaer, Abdul. *Ragam Bahasa Ilmiah*. Jakarta; Rineka Cipta, 2011.
- Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E Commerce: Perlindungan Hukum Pelaku Usaha & Konsumen E-Commerce di Indonesia, Singapura, Dan Australia*, Yogyakarta: Pramuka Grafika, Yayasan Taman Pustaka, 2017.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ekawati meneliti tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Online Pada Toko Online *Myrubylicious* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Al Adl : Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.
- Ester Dwi Magfirah, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 2009.

- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT.RajaGrafindo Persada. 2018.
- Heru Kuswanto, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan dari Buku III KUHPdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)*, Jurnal Hukum Volume xx. No.20, April 2011
- Husni Syawali dan Neni Sri Maniyati. *Aspek Hukum Transaksi Online*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia. 2008.
- Leli Joko Suryono, *Pokok pokok Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: LP3M UMY, 2014.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Munir Fuadi. *Pengantar Ilmu Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya. 2002.
- M Sadar, Moh Taufik, Habloel Mawadi, *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Akademia, 2012,
- Octavia, Rr. Lussy Listriani, *Perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang. 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce: Perlindungan Hukum Pelaku Usaha & Konsumen ECommerce di Indonesia, Singapura, Dan Australia*, Jakarta: Pramuka Grafika, Yayasan Taman Pustaka, 2017.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2004.
- Salim HS. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-empatbelas, 2019.
- Satrio, J. *Wanprestasi Menurut KUHPdata, Doktrin & Yurisprudensi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Simanjuntak Augustinus. *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*. Depok: PT.RajaGrafindo Persada. 2019.

- Simanjuntak, PNH. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia, 2015.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*: Jakarta: UI Press, 2014.
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri* Jakarta : Ghalia Indonesia. 2001.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1990.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Yosvita Prasetyaningtyas. *Hukum untuk orang awam*. Efata Publising. Yogyakarta. 2014. Hlm.21
- Zuni Rusviana dan Adi Suliantoro Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*ECommerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dinamika Hukum Vol 21 no 2 Agustus 2018.

Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Hukum Acara Perdata Indonesia
- Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 Tentang ITE sebagaimana telah dirubah dengan Ungsmh Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).

Situs Internet :

- Anne ahira, *Bisnis Masa Depan*, dalam <http://www.anneahira.com/bisnis-masa-depan.htm>
- Esther Dwi Magfirah, *Perlindungan Konsumen Dalam ECommerce*, <http://hs-nulchan.logspot.com/>

Handibasyri, *Perkembangan Bisnis Jual Beli Online*, dalam, <http://handibasyri.blogspot.com/2010/11/perkembangan-bisnisjual-beli-online.html>, scribd.

Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-commerce, dalam <http://id.Scribd>

Handi Zulkarnaen <http://rechthan.blogspot.com/2015/10/4-syarat-sahnya-perjanjiankontrak.html>, diakses 25 Februari 2021

<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>, diakses 26 Mei 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : VERYNA KUSUMA WARDANI
NPM : 5117500026
Tempat/ Tanggal Lahir : Tegal, 10 November 1997
Program Studi : Fakultas Hukum
Alamat : Prupuk Utara RT.01RW.04 Margasari Kab.Tegal

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SDN 03 Prupuk Utara	2004	2010
2	SMPN 1 Margasari	2010	2013
3	SMA N 1 Margasari	2013	2016
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	2017	2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal , Juli 2021

Hormat saya,

VERYNA KUSUWA WARDANI

